

**INDONESIA DALAM BAYANG-BAYANG KRISIS MORALITAS ERA KONTEMPORER: TINJAUAN PANCASILA DAN REVOLUSI MENTAL****Tenri Firman****Korespondensi :**

Masuk : 30 Juni 2025
Revisi : 19 Juli 2025
Diterima : 24 Agustus 2025
Diterbitkan : 27 Desember 2025

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Pbumian Pancasila



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian historis-filosofis terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara serta merefleksikan secara kritis implementasi kebijakan Revolusi Mental pada masa pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam konteks mengatasi krisis moral di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka secara mendalam, menganalisis berbagai sumber literatur sejarah, dokumen kebijakan resmi, serta berbagai publikasi ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun secara konseptual Pancasila diakui sebagai dasar negara serta Revolusi Mental telah menjadi kebijakan pemerintah, implementasi keduanya dalam praktik kehidupan berbangsa belum optimal dalam mengatasi kemerosotan moral masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama, antara lain meningkatnya kasus korupsi, potensi disintegrasi sosial, dan lemahnya efektivitas pendidikan karakter yang berdampak negatif pada keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara idealisme dan realitas lapangan dalam konteks internalisasi nilai-nilai moral Pancasila dan Revolusi Mental. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian merekomendasikan revitalisasi secara terpadu terhadap Pancasila dan Revolusi Mental sebagai pedoman etis dalam membangun karakter bangsa. Revitalisasi ini diharapkan dapat memperkuat internalisasi moralitas Pancasila, mengoptimalkan sistem pendidikan karakter yang komprehensif pada semua jenjang pendidikan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis moral secara berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Revolusi Mental, Krisis Moral, Pendidikan Karakter Diri, Pembangunan Karakter Bangsa

Cara Mengutip

Firman, T. (2025). INDONESIA DALAM BAYANG-BAYANG KRISIS MORALITAS ERA KONTEMPORER: TINJAUAN PANCASILA DAN REVOLUSI MENTAL. *Jurnal Pbumian Pancasila*, 5(2): 109-126. Tautan : <https://jurnalpbumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/88> DOI: <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i2.88>

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara-bangsa yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang memuat lima butir sila, dihadapkan dengan persoalan problem ditandai dengan fenomena degradasi moral memperparah situasi yang tidak kondusif menyebabkan ancaman perpecahan dan melahirkan sebuah kekacauan dalam sosial budaya, politik, maupun dalam praktik keagamaan dan menyinggung persoalan lingkungan. Yang mana, krisis moral ditandai dengan anjloknya nilai-nilai etika dan moral baik masyarakat maupun individu. Contoh kasus yang paling mencolok pada akhir masa jabatan era Presiden JokoWidodo adalah diberhentikannya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap mewakili erosi moral dan etika para pejabat publik.

Fenomena problem moralitas yang semakin kritis, salah satu contohnya adalah korupsi para pejabat publik, akhir-akhir ini republik dihebohkan dengan mega korupsi menggentarkan jagad dunia maya melalui sosial media bahkan ada istilah namanya “Liga Korupsi Indonesia” biasanya digunakan dalam sepakbola karena geramnya netizen Indonesia atas praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan tindak pidana korupsi atas kerugian negara. 5 daftar peringkat teratas atas praktik korupsi yang merugikan negara, dari terendah hingga tertinggi diantaranya: 1) Korupsi PT. Trans Pacific Petrochemical Indonesia (PT. TPPI) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 37,8 T, kasus pengelolaan konsendat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2011; 2) Korupsi Duta Palma, dengan penyerobotan lahan seluas 37 hektar yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 78 T; 3) Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi saat kritis moneter tahun 1997 mendapatkan suntikan dana Rp. 147,7 T guna menyelamatkan 48 bank, alhasil BLBI tidak dapat mengembalikan dana tersebut menyebabkan negara rugi sebesar Rp. 138,44 T; 4) Korupsi PT Timah dengan melibatkan Harvey Moeis dengan kerugian negara Rp. 300 T akibat dampak kerugian lingkungan; dan 5) Korupsi Pertamina rentan tahun 2018-2023 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 986,5 T. (Kusnandar, 2025) Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan kenaikan skor, dari sebelumnya berada pada angka 34/100 pada tahun 2023 meningkat pada angka 37/100 pada tahun 2024, (Humas KPK, 2025) dalam pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti, baik dari jumlah pelaku tindakan korupsi maupun besaran angka kerugian negara.

Sejumlah tokoh menanggapi kondisi bangsa dihadapkan pada krisis moral. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam Orasi Penerimaan Anugerah Hamengku Buwono IX di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul “Transformasi Mentalitas dan Kebudayaan Indonesia” ia mengungkapkan bahwa problem perilaku bersifat struktural seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, politik uang dan transaksional dan persoalan politik menyentuk ranah moral dan etika. Sedangkan problem dalam ranah kehidupan sehari-hari, misalnya judi online, narkoba, kejahatan ITE, kekerasan seksual, dan pembunuhan internal keluarga dan lingkaran orang terdekat, rendahnya tingkat kesopanan netizen Indonesia di dunia media sosial, serta persoalan sosiopatik

lainnya menjadikan masalah moral dan etika dalam mentalitas bangsa adalah kebudayaan, karena menyangkut sistem pengetahuan kolektif manusia dalam kehidupan bersama. (Grehenson, 2024b) Mahfud MD dalam diskusi Kongres Pancasila XII di Universitas Gadjah Mada, 26 September 2024, terdapat kemerosotan moral kalangan pejabat dan tidak merasa malu ketika melakukan pelanggaran hukum. Dalam waktu yang sama, Sukidi menyampaikan bahwa memperbaiki kemerosotan moral dibutuhkan pendidikan karakter akan kebutuhan negara melalui perbaikan sistem pendidikan karakter agar menjadi kuat. Sukidi menambahkan, yang menjadi alasan terhambatnya pendidikan karakter adalah menyoal pendanaan pendidikan yang kurang diprioritaskan oleh negara terkhusus keberpihakan negara dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat miskin. (Grehenson, 2024a)

Berdasarkan penyajian fenomena diatas, maka penulis menempatkan diskursus kajian ini dengan topik berjudul “Indonesia dalam Bayang-Bayang Krisis Moral era Kontemporer: Tinjauan Pancasila dan Revolusi Mental.” Urgensi dalam kajian ini diharapkan turut berkontribusi dalam kajian-kajian baik secara akademis maupun non-akademis serta menempatkan sebagai memori kolektif berbasis pada pengetahuan. Sedangkan kajian ini mempunyai urgensi secara praksis diharapkan memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan maupun masyarakat Indonesia melalui refleksi diri serta evaluasi demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penulis mengajukan *problem statement* dalam kajian ini adalah: *Pertama*, sejarah singkat dan dinamika proses perumusan pancasila beserta pandangan dari sejumlah pakar dan ahli dalam memaknai Pancasila; *Kedua*, Revolusi Mental dalam Tinjauan Historis, Gagasan dalam Kebijakan era Jokowi beserta Kritiknya; *Ketiga*, Refleksi Pancasila dan Revolusi Mental dalam Menanggulangi Krisis Moral era Kontemporer. Adapun dalam pengakjian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan, yang diambil dari beberapa sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel populer di majalah cetak maupun media online.

Pembahasan

Pancasila: Sejarah, Dinamika dan Makna Terkandung

Pancasila merupakan lima dasar berupa gagasan atau ide yang menjadi dasar negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Bung Karno, Pancasila dicetuskan dan digali dari bumi pertiwi Indonesia serta mengingat perjuangan dan penderitaan rakyat berpuluh-puluh tahun, dan melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sukarno, 1958) Dalam refleksi sejarah, Bung Karno mengatakan bahwa proses pendirian Republik Indonesia melalui perjuangan rakyat yang berpuluh tahun akhirnya dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. (Sukarno, 1958) Sebelum proses perumusan Pancasila, keinginan kuat dari keterlibatan pemuda yang mempunyai cita-cita mendirikan negara nasional. Tepat pada 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda bisa dikatakan sebagai salah satu dari persiapan ide dalam mendirikan negara nasional. Menurut Bung Karno bahwa abad ke-20 proses pendirian Republik Indonesia disebut sebagai negara ke-3 (negara ke-1 adalah Kerajaan Sriwijaya dan negara ke-2 adalah Kerajaan Majapahit) bersifat negara nasional didalamnya meliputi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk kisaran 80-82 juta

jiwa. (Sukarno, 1956)

Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke Penjara Sukamiskin, Bandung yang semakin memperdalam perenungannya. Setelah itu pada 1934, Belanda mengasingkannya ke Ende, Flores, dengan tujuan untuk memisahkannya dari pusat-pusat pergerakan di Jawa. Namun justru semakin terisolasi ia dari pusat-pusat kekuatan politik, semakin kuat pula ikatan batinnya dengan tanah air dan semakin dalam pemahamannya mengenai keluhuran nilai-nilai Nusantara. Di bawah pohon sukun di Ende, Soekarno melakukan kontemplasi mengenai masa depan bangsa Indonesia, yang mana Pancasila digali sebagai dasar moral yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Menurut Bung Karno, dalam pembentukan negara diperlukan persiapan ideologis dalam Sumpah Pemuda berisikan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa tambahnya misalnya jiwa merdeka, jiwa anti kolonialisme, jiwa ingin bebas kembali. (Sukarno, 1956)

Pancasila menurut Bung Karno ditempatkan sebagai *philosophische grondslag* (dasar falsafah bangsa) yang merupakan fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam- dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan Republik Indonesia yang merdeka dan abadi. Bung Karno menempatkan Pancasila sebagai '*Weltanschauung*' (pandangan dunia), *staat fundamental norm* (norma fundamental dasar negara). Bung Karno menempatkan Pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka. Sebagaimana Bung Karno memaknai Indonesia Merdeka yang sesungguhnya adalah: ("Pidato Bung Karno Tentang Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945," 1959)

"Dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, didalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan 'jembatan.' Diseberang jembatan, jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi."

Pancasila merupakan sebagai alat pemersatu baik sosialnya maupun pandangan filosofis dalam pemikiran. Sebagaimana Bung Karno membenarkan perkataan Sukiman, Ki Bagus Hadikusumo bahwa seyogyanya harus mencari persetujuan faham dengan *philosophische grondslag* ataupun *weltanschauung*. Bung Karno menegaskan bahwa dalam membangun sebuah bangsa melalui permufakatan bersama dalam forum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), mendirikan sebuah bangsa 'semua untuk semua' bukan satu orang, bukan satu golongan (baik golongan bangsawan maupun golongan kerja) yang mempunyai keinginan untuk kehendak akan bersatu. ("Pidato Bung Karno Tentang Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945," 1959) Mengutip Ernest Renan, bahwa syarat bangsa adalah: "*le desir d'être ensemble*", bangsa merupakan satu kelompok manusia yang mempunyai keinginan bersatu, merasa dirinya bersatu. Sedangkan menurut Otto Bauer, '*Eine Nation ist eine aus schicksalsgemeinschaft erwachsene charaktergemeinschaft*' (bangsa merupakan satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Bahaya dalam meruncingkan nasionalisme adalah chauvinisme (nasionalisme yang sempit) sedangkan Bung Karno menempatkan nasionalisme Indonesia merupakan bagian kecil daripada dunia, dengan menempatkan kebangsaan adalah peri-kemanusiaan, Bung Karno mengutip pendapat Mahatma Gandhi "*My Nationalism is Humanity*" yang artinya Nasionalisme saya adalah Kemanusiaan.

(Soekarno, 2005) Bung Karno mengatakan bahwa Internasionalisme (perikemanusiaan) tidak akan hidup subur jika tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, jika tidak hidup dalam taman- sarinya internasionalisme. Kemudian dasar mufakat dan perwakilan dalam penjelasannya bahwa negara Indonesia bukanlah satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, melainkan negara “semua untuk semua”, “satu untuk semua”, dan “semua untuk satu. Bung Karno juga mengkonstruksi prinsip kesejahteraan adalah “tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka.” dengan menawarkan demokrasi poliitk-ekonomi yang mendatangkan kesejahteraan sosial. Kemudian prinsip Ketuhanan menterjemahkan bahwa masing-masing individu ataupun masyarakat hendaknya ber-Tuhan dengan berkeadaban dan berkebudayaan dalam artian tiada egoisme agama dan saling menghormati satu sama lain.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai tuntunan dan intisari daripada jiwa Indonesia. (Soekarno, 1965) Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Notonegoro saat memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno, dikutip oleh Abdulgani, Bung Karno tidak hanya sekedar menggali saja, melainkan Pancasila berasal dari renungan yang mendalam dan penyelidikan kreatif yang teliti, berdasarkan basis pengetahuan dan pengalaman yang luas. (Abdulgani, 1987) Keterangan Abdulgani, jika siapapun yang membaca kembali pidato 1 Juni 1945, tidak hanya dengan mata, melainkan juga dengan hati dan pikiran. Sehingga bagi Bung Karno sendiri tidak sebatas penggalian sumber dari Pancasila itu sendiri, melainkan perangkaan lima sila menjadi suatu *united view* (kesatuan pandangan yang tak terpisahkan); dan juga suatu *well balance composition* (suatu rumusan sintesa yang serasi dan seimbang). (Abdulgani, 1987) Sebagaimana yang diyakini oleh Mohammad Yamin bahwa dasar falsafah Pancasila yang mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri- Kemanusiaan, Kebangsaan Indonesia yang bulat, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial sebagai satu *geloof* (dari bahasa belanda: agama, iman, atau kepercayaan). Karena dengan Pancasila pengutamaan daripada rasa kebangsaan, keinginan daripada bangsa Indonesia adalah menjadikan negara-bangsa yang kuat, serta mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur. (Sukarno, 1958) Sehingga Bung Karno menjelaskan Pancasila sebagai dorongan untuk menyatukan bangsa, negara, dan cinta ibu pertiwi. (Soekarno, 1965)

Bung Karno menganggap bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan oleh suatu Negara, dan tidak dapat dipisahkan oleh perjuangan Rakyat Indonesia. (Sukarno, 1958) Bung Karno menganggap bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya, tak lepas dari pengalaman dan pengajaran peristiwa ketika gagal dalam mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. (Sukarno, 1958) Bung Karno meyakini bahwa bangsa Indonesia dapat mempersatukan segenap pikiran, tenaga, dan tekad rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka gugurlah imperialisme dan berkibirlah Sang Merah Putih dengan megah. (Sukarno, 1958) Menurut Bung Karno, yang menjadi tantangan dalam menjalankan Pancasila dalam bingkai Republik Indonesia baik tantangan secara pribadi, nasional, maupun internasional adalah: (Sukarno, 1958) *Pertama, international cooperation or total destruction* (kerjasama internasional atau kehancuran total), *global social justice or exploitation de l’homme par*

I'homme (keadilan sosial global atau eksploitasi manusia oleh manusia); *Kedua*, tetap setia kepada proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 atau sebaliknya, menjalankan tanah air Indonesia dalam satu masyarakat yang adil dan makmur atau sebaliknya; *Ketiga*, pemuda Indonesia dapat berguna bagi diri sendiri, masyarakat, negara Republik Indonesia atau sebaliknya menjadi *crossboy or crossgirl* (pemuda laki-laki atau perempuan yang liar/berandalan).

Selain itu juga, Pancasila sebagai nilai karakter yang menjadi rambu-rambu dasar dalam pengewenjantahan kehidupan masyarakat Indonesia. (Wibowo et al., 2023). Pancasila juga dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno meyakini bahwa menempatkan Pancasila sebagai fundamental yang kuat, kekal dan abadi dapat mewujudkan persatuan Indonesia diantara berbagai macam keberagaman agama, fikiran, golongan, suku, bahasa yang dipersatukan dengan sama rasa dan sama nasib dalam bingkai dasar Pancasila. (Sukarno, 1958). Oleh karena itu, tujuan dalam pendidikan Pancasila dalam rangka memberikan bekal bagi warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk rasa cinta dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, n.d.-b) Sehingga Pancasila menjadi bagian terpenting dalam pengajaran di beberapa sekolah maupun perguruan tinggi sebagai landasan moral, etika dan ideologi bangsa yang harus menjadi pedoman bagi anak-anak maupun pemuda di Indonesia. Isu dihembuskan dengan menempatkan Pancasila dalam membentuk cara pandang, sikap, dan karakter generasi penerus bangsa dengan menempatkan muatan dan mata pelajaran wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional. (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2022)

Dalam bunyi Deklarasi Kongres Pancasila XII di UGM, salah satu bunyi pernyataan menerangkan bahwa Pancasila seyogyanya dijadikan sebagai panduan moral dan etika dalam menjaga kesatuan, kedaulatan dan keadilan sosial dalam republik yang berbasis pada demokrasi dengan menumbuhkan *nation and character building*, meritokrasi dan akses yang setara diantara warga negara, meskipun situasi dan kondisi degradasi moral secara sistematis, terstruktur dan meluas berdampak dalam jangka waktu lama. (Nugroho, 2024). Pembangunan jiwa bangsa merupakan fondasi utama bagi terwujudnya Nation & Personal Character Building, dengan menanamkan visi dan ideologi yang berakar dari rahim ibu pertiwi, membangun national pride dan emotional loyalty, serta menciptakan sistem integratif yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi nasional melalui pemahaman sejarah perjuangan bangsa (Marhaenis, 2022). Oleh karena itu, filosofi pendidikan Indonesia berdasarkan pancasila adalah pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 bukan hanya sekedar mencerdaskan intelektual, melainkan mencerdaskan moralitas. (Nugroho, 2024)

Revolusi Mental dalam Tinjauan Historis, Kemunculan era Jokowi beserta Kritik

Kata 'Revolusi Mental' kembali menggema era Presiden Joko Widodo. Sebelum masuk ke segmen gagasan tersebut, penulis mengulas historisitas Revolusi Mental oleh Bung Karno, kemunculan era Presiden Joko Widodo beserta kritiknya dari elemen lain. Dalam perjalanan sejarah,

Revolusi Mental digagas oleh Presiden Republik Indonesia Pertama, Sukarno (akrab sapaannya Bung Karno), dalam pidatonya berjudul “*Berilah Isi Kepada Hidupmu*” dalam perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi 17 Agustus 1956 di Jakarta memberikan pandangan perihal revolusi mental. Dalam pidatonya, Bung Karno menegaskan bahwa *mental investment* (investasi mental) menjadi hal yang penting seperti halnya pemupukan modal mental, modal cara berfikir, modal pandangan hidup, modal tekad, dan modal batin. (Soekarno, 1965) Bung Karno juga menerangkan bahwa *mental investment* juga menyangkut jiwa nasional yang suci-murni, “*sepi ing pamrih, rame ing gawe*” (saling membantu dengan tulus, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan/pamrih), jiwa nasional yang benar-benar jiwa proklamasi. (Soekarno, 1965) *Mental Investment* menurut Bung Karno mengarahkan pada perubahan alam-berfikir dan alam-kejiwaan serta alamnya mentalitas kolonial ke mentalitas nasional, dari alam pikiran mentaliteit *inlander* ke alam mentaliteit dinamika revolusi. (Soekarno, 1965) Bung Karno juga menyayangkan seandainya membangun jiwa tanpa adanya itikad kuat dalam membangun dan membina satu Indonesia Baru dan dihindangi penyakit *minder- waardigheidscomplex* (merasa rendah diri), jiwa yang melekat pada karatnya “*hollands denken*” (pemikiran Belanda, pada zaman pertengahan abad ke-20 mempunyai watak kolonialisme-imperialisme) dan jikalau jiwa yang belum mengalami *mental revolution* (revolusi mental) yakni Revolusi Batin, maka janganlah mempunyai harapan apa-apa mengenai hari kemudian melainkan kebelakangan dan perbudakan. (Soekarno, 1965) Mental juga menyangkut urusan moral. Misalnya, keteladanan moral dapat kita alami pada saat semasa pengasingan Bung Karno, ia tidak membiarkan dirinya terperosok dalam keputusan atau kehilangan semangat. Sebaliknya ia memandang pengasingan sebagai kesempatan untuk memperdalam pemikiran dan memperkuat wawasan politiknya. Dalam kesendirian dan keterbatasan ruang, Bung Karno melakukan kontemplasi mendalam mengenai identitas bangsa dan tujuan perjuangannya. Pengalaman ini justru semakin menyalakan api nasionalisme dalam dirinya, memperkokoh tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memberikan arah yang lebih matang terhadap visi politiknya untuk masa depan bangsa. Perenungannya ini dilakukan dengan penuh kesadaran, menghasilkan gagasan-gagasan fundamental yang kelak akan membentuk dasar ideologi negara Indonesia. Kemudian Bung Karno menempatkan politik luar negeri bebas dan aktif bukanlah politik netral yang netral melihat baik dan buruk, melainkan harus berpihak pada suatu kebenaran atas fakta, serta berpihak pada nilai yang menjunjung tinggi dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri-Kemanusiaan, Menghormati Rasa Kebangsaan, Mempraktekkan Kedaulatan Rakyat, dan Melaksanakan Cita-Cita Keadilan Sosial. (Soekarno, 1965) Revolusi Mental yang dimaksud oleh Bung Karno adalah tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila serta Revolusi Mental menghadirkan perdamaian, saling percaya satu sama lain, kerjasama. (Soekarno, 1965)

Revolusi Mental yang dimaksud oleh Bung Karno adalah tiada ego-sentrisme yang ditentukan oleh perhitungan ‘keuntungan’ yang memecah belah integrasi bangsa serta mengabaikan idealisme, misalnya keuntungan ekonomi, keuntungan politik, keuntungan militer. Oleh karena itu, Revolusi Mental secara mutlak mengatasi segala penyelewengan. (Soekarno, 1965) Dalam *nation-building*

(pembangunan bangsa) juga memerlukan Revolusi Mental, dengan praktik ‘pensucian kembali’ jiwa, ‘peremajaan’, ‘penataan kembali’, ‘pembangkitan kembali’, atau ‘penggeloraan kembali’ mengarah positivisme dan dinamika zaman permulaan revolusi kemerdekaan 1945 membangkitkan pemulihan jiwa. Sebagaimana dalam pernyataan Bung Karno dalam buku *Dibawah Bendera Revolusi* Djilid II: (Soekarno, 1965)

“Pemulihan jiwa untuk bangkit dan gerak kearah kembali cita-cita nasional, cita- cita sosial, menjadi manusia baru, een herboren men (orang yang terlahir kembali) yang bekerja, berjuang, berbakti, berkorban guna membina bangsa dan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi...Buang segala kemalasan, ego-sentrisme, ketamakan, keliaran, kemewah-mewahan, kemesuman.. menjadi manusia Indonesia, manusia Pembina, manusia yang benar-benar tulang sum- sumnya bersemboyan satu buat semua, semua buat pelaksanaan satu cita-cita.”

Menurut Bung Karno, Revolusi Mental harus melibatkan seluruh masyarakat baik organisasi, pimpinan, dan gerakan. Bung Karno menggagas Revolusi Mental melalui Gerakan Hidup Baru, yang memuat: (Soekarno, 1965)

Tujuan : Gerakan Hidup Baru bertujuan melaksanakan Revolusi Mental sebagai persiapan membangun masyarakat yang dicita-citakan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945

Isi : Gerakan Hidup Baru berisi Revolusi Mental diantaranya:

1. Perombakan cara berfikir, cara kerja, cara hidup, yang merintangi kemajuan.
2. Peningkatan dan pembangunan cara berfikir, cara kerja dan cara hidup yang baik.

Usaha : Dimulai pada 17 Agustus 1957 diantaranya:

1. Hidup sederhana;
2. Gerakan kebersihan/kesehatan;
3. Gerakan pemberantasan buta huruf;
4. Membangkitkan dan mengembangkan gotong-royong;
5. Melancarkan jawatan dan perusahaan negara;
6. Gerakan pembangunan rohani;
7. Membangkitkan kewaspadaan nasional.

Pimpinan : Pimpinan dari Gerakan Hidup Baru ada ditangan pemerintah (sipil dan militer) dan rakyat bersama.

Kemudian diproduksi ulang oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo menggagas Revolusi Mental pada 6 Desember 2016 melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam rangka *character building* (pembangunan karakter) yang berprinsip pada integritas, etos kerja dan gotong royong dalam membangun bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan menawarkan program: 1) Program Gerakan Indonesia Melayani; 2) Program Gerakan Indonesia Bersih; 3) Program Gerakan Indonesia Tertib; 4) Program Gerakan Indonesia Mandiri; dan 5) Program Gerakan Indonesia Bersatu. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017) Menurut Antonius Benny Susetyo, Revolusi Mental merupakan membangun karakter manusia baru, putih dengan semangat kesadaran dengan etos kerja berlandaskan

Pancasila bukan berwatak kolonial seperti halnya sebagai manusia yang tidak gila jabatan, merdeka dan berjiwa revolusioner serta dapat membuat daya saing. (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, n.d.-a)

Janti utama kampanye Presiden Joko Widodo soal Revolusi Mental adalah upaya untuk mengubah budaya praktik korupsi, memperkuat etika birokrasi dan penanaman nilai-nilai moral yang baik dalam masyarakat. Namun realitasnya tidak pernah nampak nyata, bahkan mengalami kemunduran. Bahkan Pakar Hukum Indonesia, Todung Mulya Lubis menilai semenjak revisi UU KPK, yang seyogyanya menjadi pelindung lembaga antikorupsi dibiarkan mengalami kemunduran karena kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar. Ironisnya, menjadikan KPK sebagai instrumen politik pemerintah digunakan untuk melawan oposisi, bukan untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Selain itu melemahnya birokrasi karena banyaknya pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi, pemerintahan tidak transparan. Kemudian *autocratitc legalism* (legalisme otorikritik) karena proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang dilakukan secara kilat tanpa proses deliberatif dan kesertaan partisipasi publik yang otentik, hanya untuk kepentingan elit. (inilah.com, 2024) Sehingga Revolusi Mental yang digaungkan oleh Jokowi mendapatkan tanggapan bahkan kritik dari sejumlah tokoh

Misalnya, Surya Paloh menyebutkan bahwa gagasan Revolusi Mental belum optimal, karena belum membawa perubahan bangsa kearah yang lebih baik dari sebelum- sebelumnya dan belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. (Kompas Cyber Media, 2023) Muhaimin Iskandar merespon Revolusi Mental ala Presiden Joko Widodo gagal dijalankan dengan baik, ia menyoroti adanya pelaku bisnis yang merangkap sebagai pembuat aturan era Presiden Joko Widodo, sehingga berpotensi kemiskinan tidak ada usainya serta ketidakadilan terjadi dimana-mana. (Kumparan, 2023) Menurut Anies Baswedan, Revolusi Mental merupakan gagasan yang baik namun belum terlaksana dengan baik. Misalnya, birokrasi yang seharusnya menggunakan sistem politik yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tidak ada 'ordal' (orang dalam), namun faktanya masih dijumpai fenomena praktik ordal bagi orang-orang terdekatnya tanpa disertai dengan kemampuan standar kompetensi. Ironisnya, isu berkembang soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal dan mahasiswa yang tidak dapat membayar UKT, diharapkan pinjam online tentunya jauh dari gagasan Revolusi Mental (Tempo, 2024) Kritik terhadap Revolusi Mental melihat adanya kesenjangan antara jargon dan praktik, serta potensi bentuk propaganda yang tidak didukung oleh perilaku nyata dan kebijakan. Selain itu, kritik menyoroti Revolusi Mental hanya dijadikan sebagai alat poliitik, dan tidak fokus pada akar masalah seperti ketimpangan sosial dan ekonomi.

Kritik tidak maksimalnya dalam penyelenggaraan Revolusi Mental, dilontarkan oleh Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmy Alaydroes mencontohkan kasus penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat Ditjen Pajak, Mario Dandy Satryo, peristiwa penganiayaan serta gaya hidup mewah-mewahan (hedon dan pamer mobil mewah) menggambarkan lemahnya pencapaian negara dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan beradab. Fahmy mencontohkan maraknya tindakan kekerasan, pemerkosaan, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar dan remaja geng

motor menunjukkan adanya krisis moral yang terjadi pada pelajar Indonesia. (Gual, n.d.) Kemudian Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi mengkritik politik dinasti Presiden Jokowi (anak, mantu, ponakan, dan bini dalam lingkaran kekuasaan) menjadi bukti nyata kegagalan Revolusi Mental. (Fazli, n.d.)

Refleksi 80 Tahun Hari Lahir Pancasila: Pengamalan Pancasila dan Revolusi Mental dalam Penanggulangan Krisis Moral era Kontemporer

Jelang 80 tahun hari lahir pancasila menjadi momentum refleksi diri dalam penguatan pemahaman dan karakter Pancasila dan pengewejantahan revolusi mental, sebagai bentuk ikhtiar dalam menanggulangi keprihatian soal kemerosotan moral yang terjadi dalam republik ini. Hal ini kita dapat berkaca pada historisitas bahwa para pendiri bangsa yang telah bersusah payah dalam memperjuangkan kemerdekaan hingga mempertahankannya, contohnya pemuda pra-kemerdekaan, berjuang dengan gigih merebut kekuasaan ditangan kolonialisme Hindia Belanda, yang mengeksploitasi sumber daya alam dan menindas rakyat Indonesia, ruang-ruang hidupnya terbatas hingga termarginalkan. Pasca kemerdekaan hingga saat ini, kita sebagai penerus kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, bukan menjauhkan diri dari falsafah dasar dalam berbangsa yakni Pancasila.

Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan moral, etika dan ideologi bangsa bagi kalangan anak-anak, pemuda maupun masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Jangan sampai praktik-praktik kekuasaan yang dilakukan pada era kontemporer mempunyai kemiripan dengan praktik kolonialisme Hindia Belanda, dengan tindakan sama namun beda aktor. Pengulangan kembali praktik yang tidak membangun berdampak pada stagnasi dalam kemajuan dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Menurut Megawati Soekarnoputri, Pancasila merupakan pemandu spiritual, politik, ekonomi dan lain-lain dapat diterapkan skala internasional untuk mencari solusi kehidupan bersama. (Haryanto, 2017)

Mencontohkan kisah Bung Karno memikirkan soal masa depan bangsa Indonesia, yang mana Pancasila digali sebagai dasar moral yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Pancasila sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan Republik Indonesia yang merdeka dan abadi, jangan ada penyelewengan kekuasaan dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, memahami dan mempraktikan Pancasila dengan menempatkan lima sila menjadi suatu *united view* (kesatuan pandangan yang tak terpisah-pisahkan); dan juga suatu *well balance composition* (suatu rumusan sintesa yang serasi dan seimbang sebagai pendorong untuk menyatukan bangsa, negara dan cinta ibu pertiwi ditengah keberagaman yang ada. Jangan sampai konflik dapat merenggangkan persatuan yang menciptakan perpecahan. Konflik antar-suku, antar-agama, antar-ras, antar-golongan jangan sampai terjadi dan berulang-ulang, seperti konflik antar- suku meletus antara suku Asmat dan suku Mappi, diskriminasi dalam beragama terjadi di Paccerakkang, Biringkanaya Makassar, konflik

yang melibatkan dua ormas di Muntilan, Magelang.

Selain itu, Revolusi Mental menjadi sorotan yang mengaitkan kebijakan pemerintah dan perilaku pejabat dengan menggunakan Revolusi Mental. Meskipun terdapat pro dan kontra. Misalnya media massa konvensional yang pro, menilai Revolusi Mental merupakan konsep yang baik karena mencakup pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara, upaya yang dilakukan bersama dan harus diawali oleh pimpinan puncak lembaga. Sedangkan yang kontra, implementasi Revolusi Mental dinilai sekadar angan tanpa implementasi, menteri/ pimpinan lembaga yang sibuk pencitraan, belum ada perencanaan nasional yang komprehensif dan hanya memboroskan APBN untuk aktivitas sosialisasi. Oleh karena itu, Pancasila dan Revolusi Mental harus dijalankan secara bersamaan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bukan hanya dengan jargon politik pencitraan untuk meningkatkan popularitas tokoh politik atau aktor siapapun yang hanya menguntungkan diri untuk kepentingan elektoral ataupun ego semata. Berikut pengamalan- pengamalan Pancasila dan pembangunan mental baik secara individu maupun masyarakat secara luas:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Megawati Soekarnoputri, bahwa pemahaman sila pertama yang diamanatkan oleh Bung Karno mempunyai urgensi dalam kehidupan dan bernegara. Dalam poin ini, bahwa dalam memahami dan mengimplementasikan sila pertama adalah dalam suatu negara yang tiap orangnya dapat menyembah tuhan dengan cara yang leluasa dan segenap rakyat dapat bertuhan secara berkebudayaan yakni tiada egoisme dalam beragama dan hendaknya negara Indonesia yang satu ini, dengan beragam cara bertuhan. (Rmol.id, 2018) Dalam penjelasan lain, implementasi dalam pelaksanaan pancasila bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan dalam menganut agama

serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dipelajarinya, perwujudan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun makhluk ciptaan Tuhan lainnya. (Wulandari, 2021) Menurut Arief Hidayat, nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut sebuah sistem nilai yang bersifat mutlak. Nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, adalah nilai etis ketuhanan yang dapat digali dari nilai profetis agama-agama dan kepercayaan bangsa yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan, ketuhanan lapang dan toleran memberi semangat kegotong-royongan dalam etika sosial maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. (Hidayat, n.d.)

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat melaksanakan sila pertama diantaranya: dapat percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa dan meyakini, menghormati agama maupun keyakinan orang lain, tidak mengganggu proses peribadatan orang lain yang berbeda agama, menghormati kebebasan dalam beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, menjaga kerukunan umat beragama, tidak menghina ajaran agama orang lain, menciptakan suasana taan beribadah dalam keluarga, dan masih banyak lagi contoh-contuh dalam praktik beragama maupun ber-tuhan sesuai dengan ajaran masing-masing.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Penjelasan dari Nurdiaman dan Setijo, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menempatkan bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mempunyai kedudukan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan agama, suku, ras dan keturunan. Dalam sila ini juga menekankan pentingnya hak asasi manusia (HAM) dengan negara yang mempunyai hukum yang berpihak pada keadilan serta mengedepankan keberadaban. (“Memaknai Nilai Kemanusiuaan Dalam Sila Kedua,” n.d.) Apalagi akhir-akhir ini yang menjadi tantangan dalam sila kedua adalah nir-kemanusiaan yakni kekerasan dan ancaman bahaya terorisme yang melanda di Indonesia, kejahatan dalam HAM (genosidan, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa dan perdubadan) dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) yang memicu konflik, ketegangan bahkan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun SARA seringkali muncul dalam momen-momen politik, misalnya menjelang pemilu.

Beberapa praktik pengamalan dalam sila ke-2, diantaranya (mediaindonesia com, 2024b): memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat karena persamaan derajat sebagai makhluk Tuhan; persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa

membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial dan berbagai bentuk apapun; sikap saling mencintai sesama manusia; memiliki sikap saling tenggang rasa dan tepa selira; jangan memiliki semena-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; membela kebenaran dan keadilan; sikap hormat dan menghormati serta bekerja sama; saling tolong menolong jika orang lain mengalami kesulitan; memberikan empati atau rasa kasih sayang; mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan lain-lain.

3. Persatuan Indonesia

Poin sila ke-3 persatuan Indonesia mempunyai urgensi dalam penanaman cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membina perdamaian dan persatuan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Dalam artian bahwa persatuan dan kerukunan yang harus dimiliki oleh individu maupun masyarakat secara luas yang berbeda dalam agama, suku, bahasa dan budaya. Dengan demikian, bahwa mencintai bangsa dan negara sendiri dengan dasar kemanusiaan dan kesamaan cita-cita tujuan bangsa adalah persatuan orang Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalis. (Tempo, 2025) Menurut Yudi Latif, wawasan persatuan-kesatuan berusaha mencari titik temu dalam segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara Pancasila.

Dalam sila ketiga ini bahwa pentingnya menekankan persatuan bangsa yang dapat dilaksanakan secara kolektif. Pada dasarnya bahwa tujuan hidup berdampingan adalah membangun persatuan serta terbebas dari segala bentuk konflik sosial. Selain itu, mempertahankan kedaulatan melalui melestarikan kearifan lokal menjadi hal yang terpenting dalam kedaulatan bangsa. Kebersamaan melalui sikap solidaritas, gotong royong dan saling membantu antar individu dalam tatanan masyarakat. (mediaindonesia.com, 2024a) Sebagaimana dalam penjelasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat diuraikan sebagai berikut: (BPIP RI, 2021) *Pertama*, persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara merupakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;

Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan; *Ketiga*, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa; *Keempat*, mengembangkan rasa kebangsaan dan tanah air Indonesia; *Kelima*, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; *Keenam*, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; *Ketujuh*, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat, Kebijakan dalam Pernusyawaratan, Perwakilan

Dalam butir sila ke-4 memuat bahwa setiap individu maupun masyarakat seluruh Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan bersama melalui mekanisme proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah bisa dilakukan dengan saling mendengarkan, menerima saran dan pendapat serta bersedia memberikan saran.

(Kompas CyberMedia, 2021) Keputusan mencapai mufakat harus dihormati dan dijunjung tinggi baik proses maupun hasil musyawarah tersebut. Dalam artian bahwa keputusan tersebut menjadi tanggungjawab individu menerima hasil kesepakatan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, keputusan diperoleh dari permusyawaratan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, menjunjung tinggi martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki peran penting dalam menjunjung tinggi aspek kehormatan, kedisiplinan, dan kewajiban terhadap diri sendiri dan orang lain.

Namun pada praktiknya orang yang diberikan kekuasaan untuk mewakili rakyat, bertindak sewenang-wenangnya dalam penggunaan kekuasaannya, yang seharusnya mewakili atau merepresentasikan kepentingan rakyat. Misalnya contoh sebagai berikut: (kumparan, 2024) *Pertama*, meremehkan atau mengabaikan pendapat atau aspirasi rakyat. Seyogyanya pendapatnya bagus maupun tidak, meremehkan pendapat orang lain merupakan tindakan yang tidak dibenarkan sama sekali; *Kedua*, tidak melaksanakan musyawarah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan perundingan. Oleh karena itu, tanpa proses musyawarah ataupun berunding, masalah bersama tidak akan menemukan solusi terbaik untuk mencari titik temu; *Ketiga*, mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan sudut pandang lainnya merupakan bertentangan, karena terkesan kehadiran orang lain tidak dianggap, hal ini memberikan kesan sepihak dan otoriter dalam kepemimpinannya.

Oleh karena itu, secara garis besar nilai yang terkandung dalam sila ke-4 diantaranya: (Denny & Anwar, 2020) *Pertama*, setiap individu dan masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; *Kedua*, tidak diperbolehkan memaksakan kehendak manusia lainnya; *Ketiga*, memprioritaskan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas; *Keempat*, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan; *Kelima*, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai dalam hasil musyawarah; *Keenam*, itikad baik dan rasa tanggungjawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; *Ketujuh*, mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan; *Kedelapan*, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; *Kesembilan*, keputusan diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam persatuan dan kesatuan demi terjalannya kepentingan bersama; *Kesepuluh*, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk melaksanakan permusyawaratan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila ke-5 ini menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Dalam artian bahwa setiap masyarakat mendapatkan keadilan ataupun berlaku adil terhadap siapapun baik dalam kehidupan pemerintahan maupun kemasyarakatan. (Kumparan, 2024) Sila ini menegaskan sebagai bentuk komitmen bangsa dalam

mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali tanpa haus memandang latarbelakang suku, agama, ras, ataupun golongan harus mendapatkan perlakuan adil dalam segala kehidupan, baik dari sektor hukum, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Misalnya sektor fundamental dalam sila ini diantaranya: (Liputan6.com, 2025) *Pertama*, prinsip keadilan yang menjadi hak setiap orang secara proporsional; *Kedua*, kesetaraan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan; *Ketiga*, solidaritas sosial berupa kepedulian dan gotong royong sesama rakyat; *Keempat*, prinsip kesejahteraan bersama dalam mewujudkan kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia; *Kelima*, keseimbangan hak dan kewajiban sebagai bentuk kesadaran warga negara seiring dengan pemenuhan hak konstitusional.

Meskipun dalam praktiknya masih menjadi dilema ketika melihat fakta-fakta sosial yang terjadi. Menurut Buya Syafi'I Maarif, dalam konteks politik banyaknya politisi seperti menteri dan anggota dewan yang tidak paham kondisi ketimpangan sosial yang seakan tidak berpedoman dengan pancasila. (Humas UMY, 2018) Begitupun masih maraknya ketidakadilan dalam penerapan hukum cenderung tajam kebawah dan tumpul keatas. Bahkan data survei populi center pada 2023 menunjukkan bahwa presentase 63,8% responden menganggap bahwa sila kelima masih belum terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga masih ditemukannya kesenjangan ekonomi (antara yang kaya dan miskin), tidak meratanya pembangunan, praktik KKN yang menghambat kesejahteraan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, ketimpangan distribusi sumber daya dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengamalan sila ke-5 diantaranya: (Liputan6.com, 2025)

Tabel 1. Perbandingan Tugas Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintahan	Masyarakat
• Pembuatan peraturan perundang- undangan yang berpihak pada kepentingan rakyat; • Pemerataan infrastruktur hingga ke daerah terpencil; • Pengembangan sistem jaminan sosial menjangkau seluruh lapisan masyarakat; • Penyediaan akses pendidikan dan kesehatan terjangkau untuk semua kalangan; • Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM; • Penegakkan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; • Perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan penyandang disabilitas.	• Menumbuhkan kepedulian sosial dan sikap gotong royong lingkungan sekitar; • Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan rakyat; • Menghargai hak orang lain dan tidak diskriminatif dalam pergaulan; • Mendukung UMKM dan produk lokal dalam pemajuan perekonomian rakyat; • Berperan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah dan penegakkan hukum; • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Daftar Pustaka

- Abdulgani, R. (1987). *Indonesia Menatap Masa Depan: Kumpulan Karangan* (Edisi 2). Pustaka Merdeka.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (n.d.-a). *Stafsus BPIP Sebut Revolusi Mental Membangun Karakter Manusia Bukan Kolonial*. Retrieved April 19, 2025, from <https://bPIP.go.id/>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (n.d.-b). *Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Ketahui Landasannya!* Retrieved April 20, 2025, from <https://bPIP.go.id/>
- BPIP RI. (2021). *Contoh Pengamalan Sila Ke-3 di Lingkungan Keluarga*. BPIP - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. <https://bPIP.go.id/>
- Denny, & Anwar, R. (2020). Aktualisasi Penerapan Nilai Sila Ke – 4 di Tengah Masyarakat. *Character Building*. <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/aktualisasi-penerapan-nilai-sila-ke-4-di-tengah-masyarakat/>
- Fazli, A. Z. (Director). (n.d.). *Bukti Gagalnya Revolusi Mental: Ada Politik Dinasti* [Video recording]. Retrieved May 1, 2025, from <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC8E74-bukti-gagalnya-revolusi-mental-ada-politik-dinasti>
- Grehenson, G. (2024a, September 27). Kongres Pancasila XII Soroti Kemerosotan Moral Pejabat dan Minimnya Pendidikan Karakter. *Universitas Gadjah Mada*.

- <https://ugm.ac.id/id/berita/kongres-pancasila-xii-soroti-kemerosotan-moral-pejabat-dan-minimnya-pendidikan-karakter/>
- Grehenson, G. (2024b, December 20). Haedar Nashir: Indonesia Tengah Hadapi Krisis Moral dan Etika. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/haedar-nashir-indonesia-tengah-hadapi-krisis-moral-dan-etika/>
- Gual. (n.d.). *Kasus Mario Dandy, PKS kritik revolusi mental ala Jokowi*. <https://www.alinea.id>. Retrieved May 1, 2025, from <https://www.alinea.id/politik/kasus-mario-dandy-pks-kritik-revolusi-mental-ala-jokowi-b2hNx9KV>
- Haryanto, A. (2017). *Megawati Ajak Negara di Dunia Terapkan 5 Butir Pancasila*. *tirto.id*. <https://tirto.id/megawati-ajak-negara-di-dunia-terapkan-5-butir-pancasila-cpMB>
- Hidayat, A. (n.d.). *Indonesia Negara Berketuhanan*.
- Humas KPK. (2025). *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*. KPK. <https://kpk.go.id/>
- Humas UMY. (2018). *Sila Kelima Pancasila Masih Menjadi Dilema – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <https://www.umi.ac.id/sila-kelima-pancasila-masih-menjadi-dilema>
- inilah.com. (2024). *Ketika The Straits Times Menulis, "Goodbye, Jokowi!"*. <https://www.inilah.com/ketika-the-straits-times-menulisgoodbye-jokowi>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2022, September 2). *Perkuat Karakter Bangsa, RUU Sisdiknas Jadikan Pendidikan Pancasila sebagai Mapel Wajib*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/09/perkuat-karakter-bangsa-ruu-sisdiknas-jadikan-pendidikan-pancasila-sebagai-mapel-wajib>
- Kompas Cyber Media. (2023, July 17). *Jokowi Tanggapi Kritik Surya Paloh yang Sebut Revolusi Mental Belum Maksimal*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/17/11244541/jokowi-tanggapi-kritik-surya-paloh-yang-sebut-revolusi-mental-belum-maksimal>
- Kompas CyberMedia. (2021). *Sila Keberapakah yang Sesuai dengan Perilaku Bermusyawarah?* KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/11/170000569/sila-keberapakah-yang-sesuai-dengan-perilaku-bermusyawarah->
- Kumparan. (2023). *Cak Imin Kritik Revolusi Mental Jokowi: Gagal Dijalankan dengan Baik*. kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/cak-imin-kritik-revolusi-mental-jokowi-gagal-dijalankan-dengan-baik-21psx9DP7aA>
- kumparan. (2024). *3 Contoh Perbuatan yang Tidak Sesuai dengan Sila Keempat*. <https://kumparan.com/ragam-info/3-contoh-perbuatan-yang-tidak-sesuai-dengan-sila-keempat-2292MeuKHgp>
- Kumparan. (2024). *Penjelasan Mengenai Nilai dan Makna Sila Ke-5 beserta Contoh Penerapannya*. <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-mengenai-nilai-dan-makna-sila-ke-5-beserta-contoh-penerapannya-23beVZQWQIf>
- Kusnandar, A. R. (2025). 'Klasemen Liga Korupsi Indonesia' Ramai, Berikut Urutannya! *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. https://umj.ac.id/just_info/klasemen-liga-korupsi-indonesia-ramai-berikut-urutannya/
- Liputan6.com. (2025, February 12). *Tegakkan Prinsip Keadilan dalam Bermasyarakat, Ini Arti Sila Ke-5 Pancasila*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5901500/tegakkan-prinsip-keadilan-dalam-bermasyarakat-ini-arti-sila-ke-5-pancasila>
- Marhaenis, A. B. (2022). Vaksinasi De-Ideologisasi Melalui Strategi Pembumian Pancasila di Kalangan Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 2(1), 66–80. <https://doi.org/10.63758/jpp.v2i1.46>
- Mediaindonesia.com. (2024a). *Mendalami Makna Persatuan dalam Sila Ketiga Pancasila*.

- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/675291/mendalami-makna-persatuan-dalam-sila-ketiga-pancasila>
- Mediaindonesia.com. (2024b). *Pengamalan Pancasila Sila ke-2 dalam Kehidupan Sehari-hari*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/493240/pengamalan-pancasila-sila-ke-2-dalam-kehidupan-sehari-hari>
- Memaknai Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua. (n.d.). *Character Building*. Retrieved May 11, 2025, from <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua/>
- Nugroho. (2024, September 30). Pancasila Alat Penghalau Kemerosotan Dalam Praktik Bernegara. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pancasila-alat-penghalau-kemerosotan-dalam-praktik-bernegara/>
- Pidato Bung Karno tentang Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. (1959). In *Himpunan Risalah Sidang yang Berkaitan dengan UUD 1945* (Jilid 1). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rmol.id. (2018). *Makna Sila Pertama Pancasila Versi Bung Karno*. <https://rmol.id/politik/read/2018/01/10/321775/makna-sila-pertama-pancasila-versi-bung-karno>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017, January 10). *Presiden Jokowi Tandatangani Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tandatangani-inpres-gerakan-nasional-revolusi-mental/>
- Soekarno. (1965). *Dibawah Bendera Revolusi Djilid II*. Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Soekarno. (2005). *Dibawah Bendera Revolusi Djilid I*. Yayasan Bung Karno.
- Sukarno. (1956). *Indonesia, Pilihlah Demokrasimu Jang Sedjati*. Kementerian Penerangan RI.
- Sukarno. (1958). *Pantja-Sila Membuktikan Dapat Mempersatukan Bangsa Indonesia*. Kementerian Penerangan RI.
- Tempo. (2024, February 6). *Anies Baswedan Kritik Revolusi Mental Jokowi, Singgung Fenomena Ordal* | tempo.co. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/-anies-baswedan-kritik-revolusi-mental-jokowi-singgung-fenomena-ordal-89978>
- Tempo. (2025). *Ini Pentingnya Pengamalan Sila ke-3 Pancasila dan Contoh Kegiatannya*. Tempo. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ini-pentingnya-pengamalan-sila-ke-3-pancasila-dan-contoh-kegiatan-nya-1190890>
- Wibowo, G. S. D., Primadhany, I. C., & Meilani, P. (2023). Pancasila sebagai Karakter Bangsa. *Indigenous Knowledge: Jurnal UNS*, 2(6).
- Wulandari, T. (2021). *Makna Sila Pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa, Ini Penjelasannya*. detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5646522/makna-sila-pertama-pancasila-ketuhanan-yang-maha-esa-ini-penjasannya>